

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan : CV Dharma Persada.
- Newman. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: 493).
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Riant Nugroho. (2014), *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samodra, Wibawa. (1994), *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia.
- Sugiono. (2009). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Alfabeth. Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Jakarta.

Jurnal

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. *Litbang Pertanian*, Bogor, 27.
- Anderson, James E. (1970). *Public Policy Making, New York: Reinhart and Wiston*.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Mappiare, A. (2009). Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan

Profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

- Putera, W. M., & Hendarto, R. M. (2018). Analisis prioritas kebijakan penanganan kemacetan jalan raya serpong kota tanggerang selatan (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Ramadhan, A. (2012). Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional. Jawa Timur : *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 1-8.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71-79.
- Siregar, S. R., Wardaya, W., & Tas'an, D. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 4(2), 147-158.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Yunas, N. S. (2017). Kebijakan Revitalisasi Sistem Transportasi Publik Sebagai Langkah Antisipatif Kemacetan Total di Kota Malang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 116-126.

Media Informasi

- Putra, Wisma., dkk. (2022). Suasana Bandung Hari Ini: Jalanan Padat, Tempat Publik Ramai. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6002958/suasana-bandung-hari-in-i-jalanan-padat-tempat-publik-ramai>. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2023)
- Sanjaya, Robby. (2022). Parah! Masalah Kemacetan Kota Bandung Menahun, Dishub Jadi Sorotan. <https://www.jabarnews.com/daerah/parah-masalah-kemacetan-kota-bandung-menahun-dishub-jadi-sorotan/> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2023)
- Wamad, Sudirman. (2022). Benang Kusut Lalu Lintas Kota Bandung yang Belum Terurai. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6307622/benang-kusut-lalu-lintas-kota-bandung-yang-belum-terurai> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2023)

Peraturan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 158 Ayat (1) dan (2).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perhubungan di Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025.

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551.2/kep 694-Dishub/2008 Tentang Tarif Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pengoperasian Trans Metro Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Pada Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.